

**KINERJA PEGAWAI BIDANG PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL  
DALAM MENGELOLA DATA TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL (DTKS)  
DI DINAS SOSIAL KABUPATEN BENGKULU TENGAH**

**Oleh:**

**Yulia Widya Astra, Nursanty**

**Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,  
Universitas Bengkulu, Kota Bengkulu**

**Email Korespondensi : [yuliawidyabengkulu@gmail.com](mailto:yuliawidyabengkulu@gmail.com)**

**Abstrak**

Persoalan kinerja pegawai dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dalam penyelenggaraan program pengentasan kemiskinan pada penyaluran bantuan sosial masyarakat miskin terutama pada pengelolaan DTKS di Kabupaten Bengkulu Tengah belum tepat sasaran. Tujuan dari penelitian ialah untuk mendeskripsikan kinerja pegawai Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial dalam mengelola DTKS di Dinas Sosial Kabupaten Bengkulu Tengah. Metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian deskripsi kualitatif, dengan teknik pemilihan informan menggunakan *purposive sampling*, teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi serta teknik analisis data menggunakan teknik reduksi data, *display* (penyajian) data dan, teknik verifikasi. Aspek penelitian berpedoman pada teori Bernardin dan Russel dalam (Huseno 2016) yang dikolaborasikan dengan Peraturan Nomor 30 Tahun 2019 Tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja pegawai Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial dalam mengelola DTKS di Dinas Sosial Kabupaten Bengkulu Tengah sudah cukup baik walaupun masih terdapat kekurangan dalam beberapa aspek indikator kinerja pegawai. Yang mana, kendala dalam hal ini dapat dilihat pertama, sub aspek kualitas kedua, sub aspek biaya, dan ketiga, sub aspek komitmen.

**Kata kunci :** Kinerja Pegawai, Mengelola, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)

**Abstract**

*The issue of employee performance in carrying out their duties and responsibilities in implementing poverty alleviation programs in the distribution of social assistance to the poor, especially in managing DTKS in Central Bengkulu Regency, is not yet on target. The aim of the research is to describe the performance of employees in the Social Protection and Security Sector in managing DTKS at the Central Bengkulu Regency Social Service. The research method used in this study uses a qualitative descriptive research approach, with informant selection techniques using purposive sampling, data collection techniques using interview, observation and documentation methods and data analysis techniques using data reduction techniques, data display (presentation) and verification techniques. . The research aspect is guided by the theory of Bernardin and Russell in (Huseno 2016) which is collaborated with Regulation Number 30 of 2019 concerning Civil Servant Performance Evaluation. The results of the research show that the performance of employees in the Social Protection and Security Sector in managing DTKS at the Central Bengkulu Regency Social Service is quite good although there are still deficiencies in several aspects of employee performance indicators. The obstacles in this case can be seen firstly, secondly, the quality sub-aspect, the cost sub-aspect, and thirdly, the commitment sub-aspect.*

**Keywords:** Employee Performance, Managing, Integrated Social Welfare Data (DTKS)

### A. Pendahuluan

Pemerintah adalah organisasi publik yang berperan sebagai subjek dari penyelenggaraan program kebijakan sebuah Negara. Kesuksesan pelaksanaan suatu program kebijakan terletak pada SDM yang berperan di dalamnya dilihat dan diukur dari pencapaian kinerja.

Pencapaian kinerja pegawai pemerintah menurut penyampaian Menteri Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) yang dilaporkan dalam (padek.jawapos 20 Jul.2023) menjelaskan bahwa ‘secara nasional kinerja pegawai pemerintahan baik pusat ataupun daerah memiliki predikat baik dan sangat baik dengan nilai mencapai 99,76%’. Namun, hal ini bertolak belakang dengan banyaknya pengaduan dari masyarakat terhadap buruknya pelayanan publik, yang mempengaruhi sikap pegawai ditinjau dari kedisiplinan pegawai, dan masalah etos kerja lainnya.

Persoalan kinerja pegawai dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya terhadap capaian program kebijakan juga terdapat dalam penyelenggaraan program pengentasan kemiskinan yaitu pada kegiatan penyaluran bantuan sosial (bansos) masyarakat miskin. Seperti yang terjadi di Desa Kersik Putih, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan yang mana pelaksanaan penyaluran bansos untuk masyarakat terdampak pandemi *Corona Disease* 2019 (Covid-19) dianggap salah sasaran. Karena, disebabkan oleh petugas pendata dari

pemerintah desa yang sengaja memasukkan anggota keluarga atau kerabatnya yang tidak miskin (Putri *dkk*, 2021). Hal ini menunjukkan bahwa adanya sikap ketidakjujuran pegawai dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya yang berdampak buruk pada kinerja pegawai itu sendiri.

Berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, menyebutkan bahwa ‘Dalam rangka penghapusan angka kemiskinan ekstrem di seluruh wilayah Indonesia pada tahun 2024, melalui keterpaduan dan sinergi program, serta kerja sama antarkementerian/lembaga maupun pemerintah daerah.’ Hal ini menunjukkan bahwa perlunya keterlibatan banyak pihak untuk bekerja sama dalam menyelesaikan permasalahan kemiskinan di Indonesia.

Berdasarkan Inpres tersebut, Menteri Sosial bertugas melakukan verifikasi dan validasi dalam pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai data dasar dan sumber utama dalam pencapaian program penghapusan kemiskinan.

Adapun, bentuk keseriusan kementerian sosial dalam menjalankan pengelolaan DTKS ini diwujudkan dengan sebuah target kinerja Kementerian Sosial (Kemensos), berikut tabel penjelasannya:

**Tabel 1.1**  
**SP dan IKP Dukungan Manajemen dan Perlindungan Sosial Pada Unit Kerja Eselon (UKE) 1 Sekretariat Jenderal**

Sasaran	Indikator	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
Meningkatnya kualitas DTKS yang lengkap, akurat dan tepat waktu serta terciptanya sistem layanan informasi kesejahteraan sosial yang handal	Persentase (%) K/L/D yang memanfaatkan DTKS dalam penyelenggaraan program penanggulangan kemiskinan	40	50	60	70	80
	Persentase (%) K/L/D yang aktif melakukan pemutakhiran DTKS	30	40	50	70	70
	Persentase (%) individu di DTKS yang teridentifikasi pada adminduk	40	40	40	40	40
	Persentase (%) ketepatan sasaran penerima program	80	82	84	85	86
	Indeks kepuasan layanan DTKS	94	94.5	95	95.5	95.5

**Keterangan :**

**SP : Sasaran Program**

**IKP : Indikator Kinerja Program**

**K/L/D : Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Sumber : Rencana Strategis Kemensos RI, 2020

Berdasarkan data tabel 1.1 di atas telah menunjukkan keseriusan pemerintah pusat di lingkungan Kemensos untuk melaksanakan peningkatan kebijakan dalam menciptakan kualitas data kemiskinan yang akurat dan lengkap guna menyelenggarakan program penghapusan kemiskinan. Melalui penetapan target kinerja tersebut, Kemensos sebagai pemerintahan tertinggi dalam struktur kelembagaan telah memberikan target pasti pada tahun 2024 indikator kerja pada program ketepatan sasaran penerimaan program jaminan sosial berada pada angka 86%. Hal itu juga mengartikan bahwa, pada pelaksanaan pemutakhiran data kemiskinan di daerah Kabupaten/Kota harus sudah mencapai 100% data mutakhir pada tahun 2024. Karena, berfokus pada arahan kebijakan dari pemerintah pusat yaitu Kemensos. Sehingga, capaian target program kemiskinan dapat terwujud sesuai dengan tujuan yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Kementerian Sosial Tahun 2020-2024 dan berjalan berkesinambungan dengan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.

Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai basis data kemiskinan yang dikelola Kemensos bertujuan untuk menetapkan sasaran penerima manfaat program perlindungan sosial dan program penanganan kemiskinan. Untuk mendukung proses pengelolaan data dan program perlindungan sosial lainnya. Kemensos melalui Pusat Data Terpadu dan Informasi Kesejahteraan Sosial (Pusdatin Kesos) mulai mengembangkan sebuah aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial-*Next Generation* (SIKS-NG).

Pengelolaan DTKS melalui aplikasi SIKS-NG sudah digunakan oleh Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Bengkulu sejak tahun 2019. Salah satu pemerintah daerah yang sudah melakukan pengelolaan DTKS pada aplikasi SIKS-NG ialah Dinsos Kabupaten Bengkulu Tengah dan menjadi tanggung jawab dari Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial.

Pelaksanaan pengelolaan DTKS di Kabupaten Bengkulu Tengah berdasarkan hasil obsevasi yang dilakukan peneliti ketika mengikuti Program Kampus Merdeka yaitu Pejuang Muda tahun 2021, pengelolaan dan pemutakhiran data

kemiskinan di Kabupaten Bengkulu Tengah masih belum 100% mutakhir. Dimana, masih banyak masyarakat Kabupaten Bengkulu Tengah yang terdaftar dalam DTKS tetapi, keluarga masyarakat tersebut sudah masuk ke dalam kategori keluarga mampu jika dilihat dari kondisi tempat tinggal. Dan sebaliknya, masyarakat yang memang secara fisik tidak mampu, tidak terdaftar ke dalam DTKS dan bukan sebagai penerima bansos. Berikut hasil dokumentasi observasi yang dilakukan peneliti ketika berkunjung ke lokasi masyarakat miskin Kabupaten Bengkulu Tengah:

**Gambar 1.1**

**Kondisi Tempat Tinggal Masyarakat Terdaftar Dalam DTKS Dan Penerima Bansos**



Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2021

**Gambar 1.2**

**Kondisi Tempat Tinggal Masyarakat Yang Tidak Terdaftar Dalam DTKS Dan Bukan Penerima bansos**



Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2021

Gambar 1.1 dan gambar 1.2 menunjukkan bahwa, terdapat kekeliruan pada kinerja Dinsos Kabupaten Bengkulu Tengah terutama pada kinerja pegawai pengelola DTKS yang menjalankan kegiatan pemutakhiran DTKS. Sehingga, hal tersebut juga sering kali menimbulkan keluhan dari

masyarakat tidak mampu ketika adanya program pendistribusian bansos yang turun dari pemerintah tidak tepat sasaran akibat dari data yang tidak akurat dan mutakhir.

Permasalahan lemahnya kinerja pegawai Dinsos Kabupaten Bengkulu Tengah dalam melakukan pengelolaan DTKS pada aplikasi SIKS-NG yang menyebabkan pelaksanaan program pendistribusian bansos sering kali tidak tepat sasaran disebabkan oleh, diantaranya: permasalahan pertama, mengenai Sumber Daya Manusia (SDM) yang mengelola data kemiskinan, dan Permasalahan kedua, yaitu mengenai fasilitas jaringan internet yang kurang memadai di beberapa Desa yang ada di Kecamatan Kabupaten Bengkulu Tengah. Sehingga, menyebabkan pengelolaan dan verval DTKS di lapangan yang dilakukan secara langsung oleh pihak Dinsos tidak maksimal.

Mengingat pentingnya *output* (hasil keluaran) dari pelaksanaan pengelolaan DTKS pada aplikasi SIKS-NG untuk mewujudkan pelayanan jaminan sosial yang tepat sasaran. Maka peneliti tertarik untuk mengangkat judul penelitian tentang “Kinerja pegawai Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial dalam mengelola DTKS di Dinas Sosial Kabupaten Bengkulu Tengah”. Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mendeskripsikan kinerja pegawai Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial dalam mengelola DTKS di Dinas Sosial Kabupaten Bengkulu Tengah.

## B. Metode Penelitian

Pendekatan penelitian ini dilakukan menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pemilihan informan dilakukan oleh peneliti berdasarkan kriteria bidang yang memiliki keterkaitan dengan topik dan objek yang diteliti, baik itu

pelaksanaan maupun petugas yang mengetahui tentang pengelolaan DTKS pada aplikasi SIKS-NG. Pemilihannya berdasarkan *purposive sampling* ialah teknik penentuan sampel berdasarkan pertimbangan tertentu seperti tugas pokok dan fungsi yang diemban oleh masing-masing pegawai yang memiliki keterkaitan dan mampu menjawab permasalahan yang diangkat oleh peneliti. Adapun, informan dalam penelitian ini yaitu terdiri dari Pegawai Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial dan Operator SIKS-NG Desa/Kelurahan. Yang mana Pegawai Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial tersebut terdiri dari 1 orang sebagai Pengelola DTKS Kabupaten, 2 orang sebagai Pengisi Data Kabupaten, 1 orang Administrasi Pengguna/*User*. Kemudian, Operator SIKS-NG Desa/Kelurahan merupakan pelaksana pengelolaan DTKS di wilayah Desa/Kelurahan yang ada di Kabupaten Bengkulu Tengah.

Upaya mendapatkan data yang berkaitan dan diperlukan terhadap permasalahan yang diteliti, maka dalam pengumpulan data ini, ada beberapa teknik pengumpulan data yang dapat digunakan yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Proses analisis data penelitian ini menggunakan tiga tahap yaitu: reduksi data, penyajian data, dan verifikasi (penarikan kesimpulan).

Aspek penelitian ini dilakukan dengan mengkolaborasikan teori indikator penilaian kinerja pegawai dari Bernardin dan Russel yang dikutip (Huseno 2016) dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2019 Tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil. Dengan pertimbangan bahwa teori tersebut sesuai dengan permasalahan yang terjadi di lokasi penelitian serta berpedoman dengan dasar pengelolaan DTKS yaitu Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Berikut penjelasan aspek-aspek penelitian, yaitu:

### **Sasaran Kinerja Pegawai (SKP), yang dalam penelitian ini terdiri dari:**

1. Kuantitas, dalam penelitian ini menjelaskan tentang jumlah data yang dikelola pegawai *user* DTKS wilayah Kabupaten Bengkulu Tengah. Dan jumlah data yang dapat terinput setiap bulannya.
2. Kualitas, dalam penelitian ini menjelaskan tentang ketepatan hasil verifikasi DTKS dan ketepatan pencapaian kegiatan.
3. Waktu, dalam penelitian ini menjelaskan ketepatan mengenai waktu pelaksanaan kegiatan per tahun.
4. Biaya, dalam penelitian ini menjelaskan tentang jumlah anggaran dana kegiatan per tahun.

### **Perilaku Kerja, dalam penelitian ini terdiri dari:**

1. Orientasi Pelayanan, menjelaskan tentang kemampuan pegawai menyelesaikan tugas pelayanan sebaik-baiknya.
2. Komitmen, menjelaskan tentang kesepakatan antara petugas DTKS Kabupaten dengan Operator SIKS-NG Desa/Kelurahan.
3. Inisiatif Kerja, menjelaskan tentang inovasi dan kreativitas pegawai dalam menyelesaikan pekerjaan.
4. Kerja Sama, menjelaskan tentang kemampuan kerja sama antar pegawai dalam melaksanakan pekerjaan.
5. Kepemimpinan, yaitu menjelaskan tentang kemampuan pegawai dalam membina, mengkoordinasikan, dan memotivasi.

### **C. Hasil Penelitian dan Pembahasan Hasil Penelitian**

Berikut akan disajikan hasil temuan penelitian yang diperoleh:

#### **Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) :**

##### **1) Kuantitas**

Kuantitas yang dimaksud pada penelitian ini yaitu berkaitan dengan

jumlah data masyarakat miskin yang dikelola Pengelola DTKS Kabupaten pada aplikasi SIKS-NG. Untuk mengetahui kinerja pegawai pada sub aspek kuantitas ini, peneliti melihat indikator kinerja yang harus dicapai pegawai berdasarkan SKP yang disusun.

Hasil wawancara penelitian menunjukkan bahwa, dalam satu tahun kerja Pegawai Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial sebagai pengelola DTKS Kabupaten melakukan pengelolaan DTKS sebanyak 64.000-an data individu, 23.000-an data keluarga dan sekitar 2.000-an (dua ribu lebih) data yang perlu di perbaiki. Data tersebut setiap bulannya harus selalu dilakukan proses *update* (pembaruan) data. Pelaksanaan pembaruan data oleh Pegawai Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial dibantu juga oleh Operator SIKS-NG Desa/Kelurahan.

Setiap bulannya jumlah data yang *terinput* (masuk) ataupun data yang perlu diperbaiki oleh Pegawai Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial tidak dapat dipastikan. Tetapi, untuk pelaksanaan pelayanan pengelolaan DTKS Kabupaten Bengkulu Tengah setiap tahunnya pada bulan tertentu bisa mencapai 100 hingga 140 DTKS dari seluruh wilayah Desa/Kelurahan yang ada di Kabupaten Bengkulu Tengah.

Adapun, dokumentasi hasil rekapitulasi yang peneliti peroleh dari informan sebagai bukti wawancara penelitian, sebagai berikut :

Tabel 5.3

## Rekapitulasi

Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)  
Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2023

Kec.	Jumlah Individu	Jumlah Keluarga	Perlu Perbaikan
Karang Tinggi	5.936	2.188	165
Talang Empat	5.203	1.847	157
Pondok Kelapa	14.080	5.077	367
Pematang Tiga	6.082	2.091	264
Pagar Jati	4.309	1.598	133

Kec.	Jumlah Individu	Jumlah Keluarga	Perlu Perbaikan
Taba Penanjung	7.107	2.505	194
Merigi Kelindang	4.435	1.657	126
Merigi Sakti	4.092	1.595	170
Pondok Kubang	5.318	1.920	209
Bang Haji	5.501	1.934	236
Semidang Lagan	3.011	1.095	96
<b>Total Seluruh</b>	<b>65.074</b>	<b>23.507</b>	<b>2.117</b>

Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2023

## 2) Kualitas

Kinerja pegawai Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial dalam pelaksanaan pengelolaan DTKS Kabupaten Bengkulu Tengah dapat dilihat pada sub aspek kualitas. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan beberapa informan di atas menyebutkan bahwa, seluruh data masyarakat miskin yang perekonomiannya sudah stabil dan sudah tidak termasuk ke dalam point-point kriteria fakir miskin akan *dinon-aktifkan/* ditidaklayakkan sebagai penerima bansos.

Kemudian, untuk mendukung hasil wawancara tersebut peneliti juga memperoleh hasil dokumentasi mengenai jumlah data masyarakat miskin Kabupaten Bengkulu Tengah dalam DTKS dari periode 10 januari tahun 2022 sampai periode oktober tahun 2023 yang dianggap tervalidasi dan sesuai sasaran, sebagai berikut:

Tabel 5.4

## Rekapitulasi DTKS

## Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2022-2023

Periode Tahun	Data Keluarga	Data Perlu Perbaikan
2022	23.744	550
2023	23.507	2.117

Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2023

Berdasarkan aspek kuantitas, kinerja

Pegawai Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial belum dikatakan mencapai tujuan program pelayanan jaminan sosial yang tepat sasaran. Karena, dilihat dari DTKS yang dikelola terverifikasi serta tepat sasaran baru menyentuh angka 96%. Hal tersebut terlihat dari perbandingan total jumlah data keluarga penerima manfaat (KPM) dengan data yang harus diperbaiki pegawai Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial. Dan pegawai yang bertugas mengelola DTKS Kabupaten Bengkulu Tengah masih membutuhkan 4% lagi pengelolaan DTKS yang 100% tervalidasi dan sesuai sasaran.

3) Waktu

Kinerja pegawai juga dapat dilihat dari ketepatan waktu pegawai dalam menjalankan pekerjaannya sesuai dengan tenggat waktu yang telah ditentukan baik oleh instansi ataupun perintah atasan. Pada aspek waktu dalam penelitian ini berkaitan dengan tepat waktu atau tidaknya pegawai Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial dalam melakukan pengelolaan DTKS Kabupaten Bengkulu Tengah dalam satu tahun kerja.

Dalam hal ini, ketepatan waktu dalam pengelolaan DTKS yang dilaksanakan oleh pegawai Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial dilakukan berdasarkan jadwal pelaksanaan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Sosial melalui Keputusan Menteri Sosial (Kepmensos) Republik Indonesia Nomor 150/HUK/2022 Tentang Tata Cara Proses Usulan Data Serta Verifikasi dan Validasi.

Adapun, rincian mengenai jadwal pelaksanaan pengelolaan DTKS di kantor Dinas Sosial Kabupaten Bengkulu Tengah dalam melakukan pemutakhiran data masyarakat miskin, seperti berikut :

**Tabel 5.5**  
**Jadwal Pelaksanaan Pengelolaan DTKS di Dinas Sosial Kabupaten Bengkulu Tengah**

Waktu	Kegiatan
<b>Tanggal 1<sup>s</sup>/<sub>d</sub> 11 Setiap</b>	Pengusulan PBI-JKN/BPJS gratis pusat/APBN DTKS oleh

Waktu	Kegiatan
<b>Bulannya</b>	operator SIKS-NG baik dari data usulan desa/kelurahan melalui operator desa/kelurahan ataupun usulan mandiri dari Dinas Sosial. Kemudian data usulan tersebut diserahkan dan disahkan oleh Bupati atau serendah-rendahnya disahkan oleh Sekretaris Daerah (Sekda)
<b>Tanggal 15<sup>s</sup>/<sub>d</sub> 20 Setiap Bulannya</b>	Pengusulan PBI-JKN/BPJS gratis pusat/APBN Non-DTKS oleh operator SIKS-NG. Kemudian data usulan tersebut diserahkan dan disahkan oleh Bupati atau serendah-rendahnya disahkan oleh Sekretaris Daerah (Sekda)
<b>Tanggal 15<sup>s</sup>/<sub>d</sub> 25 Setiap Bulannya</b>	Pengusulan DTKS atau Bansos lainnya (PKH dan BPNT)
<b>Tanggal 25<sup>s</sup>/<sub>d</sub> Akhir Bulan setiap Bulannya</b>	Finalisasi usulan DTKS dan Verifikasi kelayakan dari aplikasi/akun SIKS-NG Desa/Kelurahan hingga Kabupaten untuk diserahkan dan disahkan oleh Bupati atau serendah-rendahnya disahkan oleh Sekretaris Daerah (Sekda)

Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2023

Kinerja pegawai Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial dalam mengelola DTKS jika ditinjau dari aspek waktu sudah berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh Kemensos yang tertuang dalam Keputusan Menteri Sosial (Kepmensos) Nomor 150/HUK/2022 Tentang Tata Cara Proses Usulan Data Serta Verifikasi dan Validasi. Mengingat proses pengelolaan sudah terjadwal otomatis pada sistem aplikasi SIKS-NG. Jika terlambat maka data yang dikelola oleh Pegawai Perlindungan dan Jaminan Sosial tidak dapat ditindak lanjuti oleh Pusdatin Kesos dan keterlambatan tersebut juga dapat mempengaruhi proses pencairan dana bansos masyarakat.

#### 4) Biaya

Kinerja pegawai Bidang perlindungan dan Jaminan Sosial dalam mengelola DTKS di Dinas Sosial Kabupaten Bengkulu Tengah pada sub aspek biaya dalam penelitian ini bermaksud untuk melihat seberapa besar penggunaan anggaran biaya dalam pelaksanaan pengelolaan DTKS. Berdasarkan informasi yang peneliti peroleh dari informan bahwa, pengelolaan DTKS Kabupaten Bengkulu Tengah sampai dengan tahun 2023 tidak ada anggaran biaya yang dikeluarkan.

Berdasarkan hasil wawancara diketahui pengeluaran anggaran biaya dalam melaksanakan tugas pengelolaan DTKS di tahun 2023 belum ada. Dan anggaran biaya pernah dikeluarkan Dinas Sosial sebagai upaya menunjang keberhasilan pelaksanaan pengelolaan DTKS Kabupaten Bengkulu Tengah ialah dilaksanakannya kegiatan bimbingan teknis untuk Operator SIKS-NG tingkat Desa/Kelurahan pada akhir tahun 2022. Kemudian, peneliti juga memperoleh hasil dokumentasi pelaksanaan bimbingan teknis pada akhir tahun 2022 yang dilakukan oleh Dinsos Kabupaten Bengkulu Tengah, sebagai berikut :

**Gambar 5.17**  
**Bimbingan Teknis Pemutakhiran DTKS**  
**Operator SIKS-NG Desa/Kelurahan**  
**Di Kabupaten Bengkulu Tengah**



Sumber : Dokumentasi Penelitian, 2023

Gambar 5.17 merupakan dokumentasi Bimbingan teknis yang dilakukan Dinas Sosial Kabupaten Bengkulu Tengah sebagai bentuk sosialisasi pengenalan aplikasi SIKS-NG khusus Operator Desa/Kelurahan. Bimbingan Teknis (Bimtek) tersebut juga

sekaligus mendemonstrasikan tugas serta fungsi dari operator SIKS-NG Desa/Kelurahan dalam mengelola DTKS pada aplikasi SIKS-NG.

Selanjutnya, aspek biaya dalam penilaian kinerja pegawai juga ditinjau dari kebutuhan fasilitas dalam memenuhi kebutuhan pegawai dalam mengelola DTKS kantor Dinas Sosial Kabupaten Bengkulu Tengah masih belum terpenuhi dengan baik. Sehingga, perlu penambahan fasilitas komputer untuk Pengisi Data Kabupaten, agar proses penginputan data dan perbaikan DTKS saat sedang sibuk-sibuknya bisa berjalan efektif.

#### Perilaku Kerja

##### 1) Orientasi Pelayanan

Orientasi pelayanan dalam sub aspek ini ialah menjelaskan kemampuan Pegawai Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial dalam memberikan pelayanan pengelolaan DTKS dengan sebaik-baiknya. Berdasarkan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan dengan informan, bahwa secara umum Pegawai Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial dalam mengelola DTKS telah memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat.

Hal itu peneliti rasakan ketika melaksanakan penelitian, para pegawai Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial tidak ragu untuk membantu peneliti mulai dari kesediaan diwawancarai, memberikan informasi dan bantuan terkait pengelolaan DTKS Kabupaten Bengkulu Tengah.

##### 2) Komitmen

Pada sub Aspek komitmen dalam penelitian ini berkaitan dengan kemampuan seorang pegawai dalam menyelaraskan sikap dan tindakan dalam melaksanakan tugas dengan tujuan untuk memberikan peningkatan hasil kerja terhadap kualitas DTKS yang dikelola.

Berdasarkan informasi yang peneliti peroleh dari hasil wawancara, dapat



diketahui bahwa, Pegawai Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial telah melakukan pekerjaannya sesuai dengan arahan atasan dan juga aturan yang berlaku.

### 3) Inisiatif Kerja

Salah satunya pada sub aspek inisiatif kerja seorang pegawai yang dapat memberikan nilai positif terhadap peningkatan kualitas pelaksanaan pengelolaan DTKS.

Penjelasan hasil wawancara penelitian diketahui bahwa, bentuk inovasi yang dilakukan oleh Pegawai Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial dalam mengelola DTKS yaitu dengan membuat grup diskusi (WA grup) Operator Pengelola DTKS Kabupaten Bengkulu Tengah. Adanya grup diskusi tersebut untuk mempermudah sistem koordinasi yang dilakukan oleh pihak Dinas Sosial dengan Pemerintah Desa dalam mengelola DTKS.

Kinerja keseluruhan Pegawai Pengelola DTKS pada Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial sudah memiliki kesadaran untuk saling membantu terhadap sesama pegawai. Kemudian, inovasi kerja mengelola DTKS juga dilakukan oleh Pegawai Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial dalam berkoordinasi dengan Operator SIKS-NG Desa/Kelurahan yaitu membentuk ruang diskusi online dalam menyelesaikan pekerjaan jarak jauh.

### 4) Kerja Sama

Kerja sama menjadi indikator penting dalam menjalankan sebuah pekerjaan untuk seorang pegawai. Dari wawancara penelitian, dalam pengelolaan DTKS Pegawai Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial selalu melakukan kerja sama untuk menyelesaikan tugas tim. Kerja sama yang dilakukan berbentuk sistem komunikasi dan koordinasi yang terjalin antar pegawai di Dinas Sosial Kabupaten Bengkulu Tengah dan juga kerja sama dengan pemerintah Desa/Kelurahan.

### 5) Kepemimpinan

Pengelolaan DTKS dalam penelitian ini dilakukan secara tim. Yang mana dalam setiap pergerakan antar pegawai akan ada yang mengarahkan dan memimpin.

Berdasarkan hasil wawancara penelitian, menunjukkan bahwa secara umumnya Pegawai Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial sudah melakukan koordinasi dengan baik untuk selalu menyemangati/mengingatkan satu sama lain dalam menyelesaikan tugas.

## **Pembahasan**

### **Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)**

#### 1) Kuantitas

Kinerja Pegawai Bidang perlindungan dan Jaminan Sosial dalam mengelola DTKS pada aspek kuantitas sudah menunjukkan kinerja yang baik. Penilaian tersebut sudah sesuai dengan pencapaian target kinerja dalam SKP pegawai. Kinerja yang baik terwujud karena, tidak terlepas dari kerjasama pihak Dinsos dengan pihak Desa/Kelurahan Kabupaten Bengkulu Tengah untuk bersama-sama melakukan pengelolaan DTKS.

#### 2) Kualitas

Berdasarkan permasalahan tersebut, penilaian kinerja pegawai Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial dalam mengelola DTKS di Kantor Dinsos Kabupaten Bengkulu Tengah berdasarkan aspek kualitas DTKS yang dihasilkan belum dikatakan baik. Karena, sekitar 4% diperkirakan masih terdapat masyarakat mampu yang terdaftar dalam DTKS. Dan sudah dapat dipastikan bahwa data DTKS di Kabupaten Bengkulu Tengah belum 100% terwujudnya pelayanan jaminan sosial yang tepat sasaran.

#### 3) Waktu

Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa, kinerja Pegawai Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial dalam mengelola DTKS terlaksana dengan baik

jika dilihat dari indikator ketepatan waktu dan selalu rutin dilakukan selama 12 bulan dalam masa 1 tahun kerja sesuai dengan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP). Mengingat aplikasi SIKS-NG pada pengelolaan DTKS dapat terkunci otomatis jika sudah melewati batas jadwal kegiatan yang telah ditetapkan.

Oleh sebab itu, pegawai Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial selalu berusaha memaksimalkan pemutakhiran data pada aplikasi SIKS-NG selalu dilakukan tepat waktu. Hal tersebut bertujuan untuk menghindari gagal penginputan data DTKS yang akan mempengaruhi pencairan bansos masyarakat miskin pada periode berikutnya.

#### 4) Biaya

Berdasarkan aspek anggaran biaya penilaian kinerja pegawai Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial belum terpenuhi secara baik. Karena, biaya untuk memenuhi kebutuhan pegawai dalam hal sarana/prasarana belum memadai dan membuat pekerjaan yang dijalankan pegawai tidak efektif. Dan pelaksanaan bimtek untuk Operator SIKS-NG Desa/Kelurahan baru dilakukan satu kali. Sehingga, menyebabkan tugas dan pekerjaan yang dilakukan Operator SIKS-NG Desa/Kelurahan masih belum optimal.

### **Perilaku Kerja**

#### 1) Orientasi Pelayanan

Pegawai Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial yang bertugas melaksanakan pengelolaan DTKS Kabupaten Bengkulu Tengah menunjukkan sikap pelayanan yang baik.

Pegawai Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial khususnya pengelola DTKS selalu memberikan pelayanan dan pengarahan yang baik kepada masyarakat. Serta Pegawai Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial selalu cepat menanggapi keluhan-keluhan dari Operator SIKS-NG Desa/Kelurahan.

#### 2) Komitmen

Berdasarkan hasil wawancara yang telah

peneliti lakukan bahwa dari 4 orang PNS Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial mengungkapkan bahwa, setiap pegawai sudah melakukan pekerjaan sesuai dengan aturan yang berlaku. Namun, pada hasil penelitian mengenai pelaksanaan Pengelolaan DTKS di Kantor Dinas Sosial Kabupaten Bengkulu Tengah belum menunjukkan komitmen yang baik. Hal tersebut terlihat dari kualitas kerja yang dihasilkan dalam menetapkan data penerima bansos yang mana masih ditemukan data masyarakat yang tidak sesuai dengan kriteria kemiskinan dalam ketetapan Kementerian Sosial seperti yang telah peneliti sebutkan dalam hasil penelitian aspek kualitas DTKS.

#### 3) Inisiatif Kerja

Pada sub aspek inisiatif kerja Pegawai Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial telah menunjukkan penilaian yang baik. Hal tersebut juga dilihat melalui adanya ruang diskusi via WA grup antara Pegawai Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial dengan Operator SIKS-NG Desa/Kelurahan sebagai bentuk inovasi dari pemanfaatan teknologi untuk mempermudah komunikasi kerja jarak jauh. Yang kemudian, seluruh pegawai yang melaksanakan pengelolaan DTKS menyadari untuk meningkatkan kualitas yang baik dalam pelaksanaan pengelolaan DTKS ini sangat diperlukan sikap yang saling mengerti keadaan pegawai satu sama lain.

#### 4) Kerja Sama

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti sebutkan dalam hasil penelitian bahwa, pada umumnya pegawai pengelola DTKS telah mampu melaksanakan tugas dengan bekerja sama baik antar rekan kerja, maupun antara pegawai dengan atasan dan juga pemerintah Desa/Kelurahan. Seperti yang telah peneliti bahas dalam hasil penelitian bahwa kerja sama yang terjalin sudah baik

karena komunikasi dan koordinasi selalu berjalan dengan efektif.

#### 5) Kepemimpinan

Seperti yang telah dikemukakan peneliti dalam hasil penelitian bahwa secara pribadi seluruh pegawai pengelola DTKS pada Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial telah mengetahui tupoksi masing-masing. Secara tidak langsung hal tersebut menunjukkan bahwa setiap pegawai telah mampu memimpin diri sendiri untuk melakukan tugas dengan sebaik mungkin tanpa harus diarahkan dan disuruh oleh pimpinan.

### **D. Kesimpulan dan Saran**

#### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah peneliti sebutkan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa, Kinerja Pegawai Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial dalam mengelola DTKS di Dinas Sosial Kabupaten Bengkulu Tengah telah menunjukkan kinerja yang cukup baik. Dengan penjelasan sebagai berikut:

#### **Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)**

##### 1) Kuantitas

Kinerja Pegawai Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial berdasarkan indikator sub aspek kuantitas sudah baik. Dan pengelolaan DTKS dalam 12 bulan masa kerja sudah mencapai target kerja yang ditentukan dalam SKP.

##### 2) Kualitas

Kinerja Pegawai Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial belum sesuai dengan tujuan pencapaian program DTKS yang tepat sasaran. Disebabkan karena, pelaksanaan DTKS yang tumpang tindih dan belum terbentuknya komitmen pemerintah.

##### 3) Waktu

Pelaksanaan pengelolaan DTKS sudah dilakukan dengan tepat waktu dan sesuai dengan tenggat waktu yang diberikan oleh Kemensos.

##### 4) Biaya

Pelaksanaan pengelolaan DTKS di tahun 2023 tidak mengeluarkan anggaran biaya. Tetapi, anggaran biaya pernah dikeluarkan pada tahun 2022 untuk pelaksanaan bimtek Operator SIKS-NG Desa/Kelurahan. Dan mengenai sarana/prasarana pendukung dalam menjalankan tugas pengelolaan DTKS masih belum memadai khususnya untuk Pegawai Peningkat DTKS Kabupaten.

#### **Perilaku Kerja**

##### 1) Orientasi Pelayanan

Perilaku kerja pegawai dalam memberikan pelayanan sudah baik. Dilihat dari sikap dan tindakan yang dilakukan pegawai untuk melaksanakan tugas pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat yang berkunjung ke Dinas Sosial Kabupaten Bengkulu Tengah.

##### 2) Komitmen

Pelaksanaan pengelolaan DTKS pada sub aspek komitmen pegawai mengatakan sudah melakukan pekerjaan dengan bersungguh-sungguh dan mematuhi aturan. Tetapi, dalam pengelolaan DTKS secara kualitas data yang dikelola masih terdaftar data masyarakat ekonomi mampu pada aplikasi SIKS-NG.

##### 3) Inisiatif Kerja

Pada sub aspek inisiatif kerja Pegawai Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial sudah menunjukkan perilaku kerja yang baik. Hal itu terlihat dari sikap kepedulian untuk saling membantu satu sama lain dalam menyelesaikan pekerjaan. Dan bentuk kreativitas pegawai terlihat dengan adanya pemanfaatan teknologi komunikasi jarak jauh yaitu melalui diskusi grup WA untuk mempermudah sistem koordinasi dalam bekerja.

##### 4) Kerja Sama

Perilaku kerja Pegawai Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial sudah menunjukkan kerja sama yang baik. Terlihat dari kerja sama yang terjalin antara pegawai dalam menyelesaikan

permasalahan pengelolaan DTKS pada aplikasi SIKS-NG.

#### 5) Kepemimpinan

Perilaku kerja pada sub aspek kepemimpinan sudah dilakukan dengan baik. Hal tersebut terlihat dari sikap pegawai yang telah mampu memimpin diri sendiri untuk melaksanakan tugas dengan sendirinya tanpa menunggu arahan/perintah dari atasan.

#### Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan yang telah dikemukakan penulis di atas, adapun saran yang dapat penulis berikan, sebagai berikut:

1. Diharapkan proses pengelolaan DTKS pada periode selanjutnya Pegawai Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial serta Operator SIKS-NG dapat lebih berkomitmen dan jujur dalam menjalankan tugas dan amanah.
2. Pada sub aspek biaya, sebaiknya di tahun selanjutnya Dinas Sosial Kabupaten Bengkulu Tengah telah mampu memberikan fasilitas pendukung yang baik kepada para pegawai.
3. Pelaksanaan bimtek yang belum dapat terlaksana secara rutin. Penulis menyarankan agar bimtek dapat dilaksanakan dalam satu tahun 2/3 kali secara online untuk meminimalisir anggaran biaya.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### Buku-buku:

Helmizar dkk. (2021) *Akuntabilitas Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI*. Jakarta, Indonesia. Tersedia pada: [https://www.researchgate.net/profile/Andri-Anto-3/publication/3335618543\\_BUKU\\_MANAJEMEN\\_BANK\\_SYARIAH/links/5d7090894585151ee49e5437/BUKU-MANAJEMEN-BANK-SYARIAH.pdf](https://www.researchgate.net/profile/Andri-Anto-3/publication/3335618543_BUKU_MANAJEMEN_BANK_SYARIAH/links/5d7090894585151ee49e5437/BUKU-MANAJEMEN-BANK-SYARIAH.pdf).

Widyaningsih, D. dkk. (2022) *Mendorong Pemutakhiran Berkelanjutan terhadap Data Terpadu Kesejahteraan Sosial*. Diedit oleh Sudiarno. Jakarta, Indonesia: The SMERU Research Institute. Tersedia pada: [www.smeru.or.id](http://www.smeru.or.id).

##### Jurnal:

Putri, E.A., Muchsin, S. dan Hayat, & (2021) "Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Sosial Bagi Masyarakat Terdampak Di Era Pandemi Covid-19 (Di Desa Kersik Putih Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu)," *JIP (Jurnal Inovasi Penelitian)*, 1(12), hal. 2853–2854.

##### Media Massa dan Media Sosial

Admin, (2022) *Dinas Sosial Kabupaten Bengkulu Tengah*. Tersedia pada: <https://dinsos.bengkulutengahkab.go.id/Kontak> (Diakses pada: 9 Januari 2023)

Bengkulu, Antara News;. (2022, Januari 22). Sebanyak 78 Desa di Provinsi Bengkulu Tidak Memiliki Jaringan Internet. *ANTARA BENGKULU*. Bengkulu, Indonesia. Tersedia pada: <https://bengkulu.antarane.ws.com/amp/berita/212933/sebanyak-78-des-a-di-provinsi-bengkulu-tidak-memiliki-jaringan-internet> (Diakses pada: 5 Juli 2023)

RRI, Aribowo, Reja. (2022). Radio Republik Indonesia (RRI) Daerah Bengkulu. Tersedia pada: <https://www.rri.go.id/daerah/87927/kepala-dinas-sosial-bengkulu-tengah-membuka-acara-bimtek-pemutakhiran-data-terpadu-kesejahteraan-sosial>. (Diakses pada: 18 Oktober 2023)

Redaksi. (2020) It Works. (Inspire Great & Telco For Bussines Performance), Tersedia pada: <https://www.itworks.id/34931/kemensos-kembangkan-sistem-informasi-kesejahteraan-sosial-next-generation-untuk-kelola-data-kemiskinan-yang-akurat-dan-aktual.html> (Diakses pada: 24 Februari 2023)

Padek.jawapos, Admin. (2023) Padek.jawapos.com. Tersedia pada: <https://padek.jawapos.com/nasional/20/07/2023/menpanrb/ungkap-fenomena-kinerja-pegawai-baik-tapi-banyak-pengaduan-masyarakat/>. (Diakses pada: 12 September 2023)

##### Dokumen dan Undang-Undang

Instruksi Presiden (Inpres) Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem  
Keputusan Menteri Sosial (Kepmensos) Republik Indonesia Nomor 150/HUK/2022 Tentang Tata Cara Proses Usulan Data Serta Verifikasi dan Validasi

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia  
(Permensos RI) Nomor 3 Tahun 2021 Tentang  
Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan  
Sosial

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 6  
Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis  
Kementerian Sosial Republik Indonesia  
Tahun 2020-2024

Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor  
30 Tahun 2019 Tentang Penilaian Kinerja  
Pegawai Negeri Sipil